

**SANKSI HUKUM TERHADAP PENGELOLA PERUMAHAN YANG
MELANGGAR ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M.LUTHFI FARHANY

NIM 20.10.0040

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG 2024**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M.LUTHFI FARHANY
NPM : 20.10.001
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI & BISNIS
JUDUL : "SANKSI HUKUM TERHADAP
PENGELOLA PERUMAHAN YANG
MELANGGAR ASAS
KESEIMBANGAN DALAM
PERJANJIAN"

PALEMBANG, 25 JUNI 2024

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

ERNIWATI S.H., M.Hum

PEMBIMBING II

JHONI S.H., M.H

MENGETAHUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
ERNIWATI S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.LUTHFI FARHANY
Tempat, tanggal Lahir : Palembang, 17 Mei 2002
Nomor Pokok Mahasiswa : 20.10.0040
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang Juni 2024



M.luthfi farhany

NPM. 20.10.0040

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **SANKSI HUKUM TERHADAP PENGELOLA PERUMAHAN YANG MELANGGAR ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN**”. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana sanksi hukum pengelola yang ingkar janji terhadap perjanjian yang telah di sepakati. 2. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian perumahan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum bagi pengelola perumahan yang ingkar janji terhadap perjanjian yang telah di atur berdasarkan Undang-Undang konsumen Pasal 62 dan pasal 134 jo pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Payung hukum dalam penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian perumahan adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Sanksi hukum, penerapan asas keseimbangan dan perlindungan hukum.